

# **MANAJEMEN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

**OLEH : Prof. Dr. DEDEN MULYANA SE.,M.Si\***

Makalah disampaikan pada: Seminar Nasional “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembangunan Karakter Bangsa” Kerjasama antara Universitas Siliwangi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tasikmalaya, 12 Maret 2012

## **A. HAKIKAT OTONOMI DAERAH**

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri yang bersumber dari wewenang pangkal dan urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri adalah dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti otonomi suatu daerah, penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri, pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban daerah sendiri.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur/mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur/mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority, self regulation to its laws and affairs* dari daerah lain baik secara vertikal/horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*.

## **B. TUJUAN PEMBERIAN OTONOMI DAERAH**

1. Dari aspek politik: untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri/mendukung politik dan kebijakan nasional dalam rangka proses demokrasi di lapisan bawah.
2. Dari aspek manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan.
3. Dari aspek kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan usaha pemberdayaan (*empowerment*).
4. Dari aspek ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya tingkat kesejahteraan rakyat.

## **C. MACAM OTONOMI YANG PERNAH DITERAPKAN DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA**

- a. OTONOMI ORGANIK (RT ORGANIK)
- b. OTONOMI FORMAL (RT FORMAL)

- c. OTONOMI MATERIAL (RT MATERIAL/SUBTANTIF)
- d. OTONOMI RIIL (RT RIL)
- e. OTONOMI YANG NYATA, BERTANGGUNGJAWAB DAN DINAMIS

Otonomi organik; otonomi ini mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi daerah/urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ kehidupan yang merupakan sistem yang menentukan hidup matinya manusia

Otonomi formal; apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif, satu-satunya yang membatasi adalah daerah otonom yang bersangkutan, tidak mengatur apa yang telah diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*rangorderegeling*). Dengan demikian daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangga sepanjang tidak memasuki area pemerintah pusat (sering disebut otonomi sisa).

Otonomi material; kewenangan daerah otonom dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurus. Apabila urusan pada substansinya dinilai menjadi urusan pemerintah pusat maka pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada khakekatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut.

Otonomi riil; merupakan gabungan antara otonomi formal dan material. UU pembentukan daerah otonom pemerintah daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan wewenang lain secara bertahap. Artinya kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dan dinamis; otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan UU yang berlaku. Sistem ini yang disebut desentralisasi fungsional, artinya kepada daerah diserahkan suatu hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus/mengatur rumah tangga sendiri.

#### **D. KEWAJIBAN OTONOMI DAERAH**

Nuansa kewajiban otonomi daerah dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah nampaknya lebih menonjol daripada nuansa haknya. Meskipun gairah dan tuntutan otonomi daerah akhir-akhir ini lebih banyak berasal dari bawah (*bottom up*), namun pada tataran operasional tuntutan otonomi daerah yang telah mendapatkan restu dari pusat menjadi persoalan baru di masyarakat, di satu pihak masyarakat menginginkan sesuatu di pihak lain pemerintah daerah menginginkan hal lain, yang terjadi akibatnya adalah konflik. Fenomena semacam ini terus menerus terjadi di berbagai daerah, sehingga muncul berbagai pertanyaan dan pernyataan, apakah manajer pemerintah di daerah yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas memimpin daerah atau masyarakatnya yang tidak memahami kepentingan pemerintah daerah, sehingga masyarakat di daerah seringkali kehilangan kontrol, berlaku brutal, anarkis dan sebagainya. Hal inilah barangkali menurut hemat saya yang

perlu dipahami dan dilakukan oleh semua pihak yaitu bagaimana mengembalikan perilaku masyarakat di daerah ke perilaku yang didasari oleh etika dan budaya lokal, agar karakter bangsa Indonesia yang terkenal ramah, sopan, santun, penuh dengan rasa hormat terhadap sesama, mau bekerjasama dan bertanggungjawab, demikian pula pemimpin di daerahnya.

## E. KARAKTER BANGSA

- Karakter bangsa adalah sifat mental atau etika yang kompleks, yang menjadi ciri suatu bangsa.
- Karakter ini merupakan “bawaan” yang melekat pada suatu bangsa: cara berfikir, berkata, dan bertindak, cara respons. Contoh beberapa kasus di Jepang: toko barang bekas; perusahaan yang hampir bankrut
- Karakter bukan sesuatu untuk diperlihatkan kepada orang atau bangsa lain tetapi adalah sesuatu yang ditunjukkan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya

Berikut adalah 6 pilar karakter dari Josephson Institute, (<http://charactercounts.org/sixpillars.html>, diakses tanggal 3 April 2010)

### 1. *Trustworthiness* (dapat dipercaya)

- Jujur
- Tidak curang, mencuri
- *reliable* (lakukan apa yang dikatakan)
- Mempunyai keberanian (keteguhan) untuk melakukan hal yang benar dalam kondisi apa pun (integritas)
- Membangun reputasi
- Loyal (siap membantu keluarga/teman dan membela negara)

### 2. *Respect* (menghormati orang lain)

- Menghargai terhadap sesama
- Toleran terhadap perbedaan
- Perilaku baik dan bertutur kata yang sopan
- Peka terhadap perasaan orang lain
- Tidak menyakiti orang lain
- Menahan amarah

### 3. *Fairness* (adil)

- Sesuai aturan main
- Berbagi
- Berpikiran terbuka, mau mendengar orang lain
- Tidak memanfaatkan orang lain
- Tidak (selalu) menyalahkan orang lain

### 4. *Caring* (perhatian terhadap orang lain)

- Baik hati
- Peduli pada penderitaan orang lain
- Berterimakasih

- Pemaaf
- Penolong

6. **Citizenship (Warga masyarakat, warganegara)**

- Berbeda dengan komunitas: tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, masyarakat
- Kerjasama
- Terlibat/partisipasi dalam kegiatan masyarakat/negara: kerja bakti, sukarelawan, pajak, pemilu,
- Menjadi tetangga yang baik
- Mentaati hukum
- Menghormati petugas hukum, birokrasi
- Melestarikan lingkungan

Abraham Lincoln menyatakan bahwa : “reputasi adalah bayangan. Karakter adalah pohon”

Dalam hubungan ini konteks otonomi daerah tidak memungkinkan lagi manajemen otonomi daerah hanya didasarkan pada hak daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan lokalitas, akan tetapi manajemen otonomi daerah untuk tidak didekati lagi dengan prinsip *business as usual*, melainkan dengan *business as it could be* (dr. Syakrani. 2009). Lebih jauh dr. Syakrani menyebutkan bahwa maksudnya elit politik dan birokrasi di daerah harus mampu mengembangkan inovasi dan terobosan yang akan menjadi *best practice*. Dalam banyak kasus *administrative best practice* yang diprakarsai oleh organisasi pelaksana tidak akan efektif tanpa *political best practice* yang kokoh dari pemimpin, dan *political best practice* yang dimaksud hanya berkembang dari *altruistic leadership*.

Jika kita mau jujur bangsa jepang setelah di bom atom 1945, dalam waktu yang relatif singkat dapat menjadi negara maju dengan diawali manajemen yang dikenal dengan restorasi meiji, keberhasilan bangsa jepang juga karena didasari oleh altruistik yang tinggi yaitu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini sebenarnya telah dimiliki oleh bangsa indonesia sejak orde baru, namun karena prinsip tadi tidak terinternalisasi maka akibatnya karakter bangsa menjadi luntur.

Oleh sebab itu semangat kedaerahan/lokalitas yang diberikan dalam bentuk otonomi harus dipahami sebagai unit-unit dalam sebuah sistem pemerintahan yang menjadikan integrasi dan integritas bangsa saat ini. Jika implementasi otonomi keluar dari koridor yang seharusnya, maka sesungguhnya format manajemen pemerintahan dan kepemimpinan di daerah patut dipertanyakan baik secara konstitusional maupun secara moral.

Dimensi otonomi daerah paling tidak memuat dua dimensi yaitu dimensi politik dan dimensi administratif. Pada sistem pemerintahan yang bernuansa politisasi, birokrasinya masih kuat dengan aspek-aspek politik otonomi daerahnya dan dapat berakibat pada hegemoni aspek administratifnya. Hal inilah yang seringkali menjadi penyebab birokrasi tidak stabil dan rentan terhadap perubahan rezim. Dalam hubungan ini maka dibutuhkan gaya kepemimpinan yang inovatif dan

kreatif dari mulai gubernur, bupati/walikota, untuk mensinergikan tendensi politik dan tata kelola administratif pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengedepankan pelayanan publik bukan pendekatan pelayanan terhadap elit/birokrat.

## **F. KESIMPULAN**

Diperlukan pemimpin di daerah yang mampu menumbuhkan nasionalisme untuk memajukan pembangunan di daerah dengan mengedepankan komitmen dan partisipasi.

Pembangunan bangsa memerlukan bangsa yang berkarakter baik, karakter akan tercermin dalam reputasi (kinerja) aparat di daerah;

Karakter bangsa harus berangkat dari visi, misi dan nilai hidup masyarakat di daerah;

Pendidikan karakter harus dimulai sedini mungkin

Demikian beberapa pemikiran tentang manajemen otonomi daerah dalam perspektif pendidikan karakter bangsa, semoga bermanfaat.

TASIKMALAYA, 12 MARET 2012

PROF. DR. DEDEN MULYANA, SE,.M.Si  
DEKAN FISIP UNSIL

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mas'ood, Mohtar. 2008. Politik Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HR. Syaukani. 2007. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan.

Tri Ratnawati. 2009. Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi "Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Widjaja. HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Sumber lain:**

Josephson Institute. <http://charactercounts.org/sixpillars.html>, diakses tanggal 3 April 2010.